

SUMBERDAYA LAUT DAN PESISIR – TAHUN 2012

8. Arafura and Timor Seas Ecosystem Actions (ATSEA)



Latar Belakang :

Perairan Laut Arafura dan Timor (ATS) merupakan perairan semi-tertutup yang dimiliki oleh Indonesia, Timor-Leste, Papua Nugini (PNG) dan Australia, dimana dalam hal pengelolaan sumber daya, perlindungan lingkungan dan penelitian ilmiah dibidang kelautan perlu melakukan kerja sama (Konvensi PBB tentang Hukum Laut-Pasal IX). Wilayah ATS memiliki produktivitas tinggi yang menopang baik perikanan skala kecil dan besar, termasuk beberapa sumberdaya ikan yang bersifat "shared", dan lintas batas yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Nilai penting lainnya dari ATS tersebut adalah menyediakan penghidupan bagi jutaan orang di wilayah tersebut, dan memberikan kontribusi yang nyata terhadap keamanan pangan untuk populasi penduduk daerah pesisir ATS dan negara-negara besar tujuan ekspor. Selain masalah perikanan yang tidak berkelanjutan dan IUU fishing, Laut Arafura dan Timor juga menghadapi ancaman nyata dari sejumlah tekanan lain termasuk potensi peningkatan ancaman alam yang berkaitan dengan perubahan iklim, berkembang pesatnya populasi pesisir, meningkatnya urbanisasi, tingkat kemiskinan yang tinggi dan kesempatan ekonomi yang terbatas yang dapat meningkatkan tekanan eksploitatif terhadap sumber daya alam, degradasi habitat pesisir, pencemaran laut yang berasal dari darat dan laut, serta invasi spesies aquatic. Dalam menanggapi tantangan pengembangan pengelolaan sumber daya alam di wilayah ATS, pada tahun 2002 Australia, Indonesia dan Timor-Leste membentuk *Arafura dan Laut Timor Expert Forum (ATSEF)*, dimana *Arafura and Timor Seas Ecosystem Action (ATSEA)* Program merupakan langkah konkret ATSEF dalam pengelolaan perairan ATS secara regional.

Tujuan & Sasaran:

1. Terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati pesisir dan laut yang secara ekologi berkelanjutan, termasuk perikanan dan keanekaragaman hayati di wilayah Laut Arafura-Timor, serta meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan peluang yang berkelanjutan bagi masyarakat pesisir di wilayah Laut Arafura dan Timor.
2. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh ATSEA adalah terjaminnya keterpaduan kerjasama, keberlanjutan, pengelolaan berbasis ekosistem dan pemanfaatan sumberdaya hayati pesisir dan laut, termasuk perikanan dan keanekaragaman hayati di Laut Arafura dan Timor. Hal ini dapat dicapai melalui perumusan dan adopsi antar-pemerintah negara pantai terkait serta implementasi awal dari suatu Program Rencana Aksi Strategis (SAP) secara regional, yang kemudian untuk setiap negara dibuat *National Action Plan (NAP)* yang merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari SAP.

Metode :

Sesuai dengan *Project Document*, ATSEA program dimulai pada bulan Juli 2010 dan akan berakhir pada bulan Juli 2014. Daerah penelitian meliputi perairan Laut Arafura dan Laut Timor yang berbatasan dengan keempat negara yaitu Indonesia, Australia, Timor-Leste dan Papua New Guinea. Untuk penyusunan suatu Rencana Aksi Strategis (SAP) secara regional perlu dibuat terlebih dulu suatu *Diagnosa Analisis Lintas Batas (Transboundary Diagnostic Analysis/TDA)* yang harus diterima dan disahkan oleh negara-negara yang terlibat dalam kegiatan ATSEA program ini. Data dan informasi yang berkaitan dengan Biophysics, Sosial Ekonomi, Pemerintahan dan Peraturan (*Governance and legal institution*) serta keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholder*) menjadi penting dan diperlukan dalam rangka penyusunan TDA. Serangkaian kegiatan pengumpulan data melalui pengumpulan data sekunder dan studi pustaka serta pengumpulan data primer dengan mempergunakan kapal penelitian telah dilaksanakan.

Hasil :

Pada tahun ke-1 (2010) dan tahun ke-2 (2011) telah dihasilkan diterbitkan beberapa tulisan yang dipakai sebagai dasar didalam penyusunan TDA yaitu: (1) *Biophysics profiles of Arafura and Timor Seas region*; (2) *Socio-Economic profiles of Arafura and Timor Seas region*; (3) *Legal and institutional framework*; (4) *Causal – chain analysis*; (5) *Stakeholder engagement analysis*.

Pada bulan Maret tahun 2012 melalui ATSEA *Project Board Meeting*, TDA diterima dan ditanda tangani oleh "*National Focal Point*" dari ketiga negara yaitu Indonesia, Timor-Leste dan Australia. TDA mengidentifikasi isu lingkungan yang bersifat lintas batas yang perlu diperhatikan sebagai berikut: (1) Perikanan yang tidak berkelanjutan dan penurunan serta hilangnya sumber daya hayati pesisir dan laut; (2) Modifikasi, degradasi dan hilangnya habitat pesisir dan laut; (3) Polusi darat dan laut; (4) Penurunan dan hilangnya keanekaragaman dan jenis tertentu; (5) Dampak perubahan iklim. Hal tersebut akan menyebabkan hilangnya jasa ekosistem di wilayah perairan ATS yang mempunyai dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat dan akan mempengaruhi keamanan pangan serta mata pencaharian seperti juga halnya membawa pengaruh terhadap ekonomi dan struktur sosial setiap negara ATS. Melalui analisis "*causal-chain*", penyebab langsung maupun tidak langsung secara sektoral terhadap degradasi lingkungan di wilayah ATS dapat diidentifikasi

SAP untuk wilayah perairan Laut Arafura dan Timor (ATS) adalah merupakan dokumen kebijakan yang "dapat" dinegosiasikan, yang menggambarkan kebijakan dan reformasi institusi, pengembangan kapasitas dan investasi yang diperlukan untuk mengadres masalah masalah utama yang bersifat lintas batas yang telah diidentifikasi pada TDA di wilayah perairan ATS. Oleh sebab itu ATS SAP akan memilih pendekatan berbasis ekosistem untuk menjaga keberlangsungan fungsi ekosistem yang vital dan jasa ekosistem yang penting untuk kesejahteraan masyarakat. Lima tujuan kualitas lingkungan jangka menengah dan panjang yang ditetapkan dalam SAP untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan adalah: (1) *Recovery* dan keberlanjutan perikanan; (2) Perbaikan habitat yang rusak untuk dapat menyediakan jasa lingkungan yang berkelanjutan; (3) Mengurangi pencemaran yang berasal dari laut maupun darat; (4) Melindungi "*key marine species*"; (5) Mendukung adaptasi masyarakat/comunitas berbasis ekosistem terhadap dampak perubahan iklim pada sektor-sektor terkait.

Tujuan kualitas lingkungan jangka menengah ini dapat dicapai melalui penetapan tujuh "Tujuan operasional", dimana untuk pencapaiannya setiap "Tujuan operasional" tersebut masing-masing mempunyai "Aksi prioritas" yang selanjutnya diterjemahkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan baik ditingkat regional maupun nasional. Suatu kelembagaan yang kuat ditingkat regional dan nasional beserta mekanisme finansial yang berkelanjutan di tingkat regional maupun nasional adalah diperlukan dan difungsikan untuk mengawal implementasi dari SAP dan NAP. SAP dan NAP adalah suatu "*Living document*" yang adaptif sehingga dapat berubah sesuai dengan kebijakan pemerintah dan permintaan pemangku kepentingan atas pertimbangan azas pembangunan yang berkelanjutan baik ekologi maupun ekonomi. Komitmen yang tinggi dari pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya termasuk lembaga internasional terhadap implementasi SAP maupun NAP sangat merupakan kunci untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh negara-negara pantai sekitar wilayah ATS.

Unit Kerja : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Pesisir
 Alamat : Jl. Pasir Putih I Lantai 3, Ancol Timur, Jakarta Utara 14430 – DKI Jakarta / Telp. : (021) 64711583 pes 4304 / Fax. : (021) 64711654

Lokasi Kegiatan : Propinsi NTT, Maluku, Papua

Peneliti Utama Keg : Dr. Tonny Wagey
 Anggota Peneliti :

Program Renstra : Penelitian dan Pengembangan Iptek Kelautan dan Perikanan
 Program APBN : Penelitian dan Pengembangan Iptek
 Sumber Dana : - RM : xxx
 - PHLN : Rp. 2.325.500.000 Realisasi : Rp. 2.325.500.000 (100%)

Mitra Kerja Sama : UNDP, UNOPS
 Dana Pendamping :
 Pengguna : Peneliti, stakeholder kegiatan